

**PENDEKATAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN TAMAN ODAH BEKESAH
(*WATERFRONT CITY*) DI KAWASAN KARANG MUMUS
SEGMENT PERNIAGAAN KOTA SAMARINDA**

Yanuar Ismawati, Daryono Daryono

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pendekatan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Taman Odah Bekesah (*Waterfront City*) di Kawasan Karang Mumus Segmen Perniagaan Kota Samarinda.

Pengarang : Yanuar Ismawati

NIM : 1802015068

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 2 Oktober 2025
Pembimbing,



Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP. 19750416 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 3

Tahun : 2025

Halaman : 685-692

PENDEKATAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN TAMAN ODAH BEKESAH (*WATERFRONT CITY*) DI KAWASAN KARANG MUMUS SEGMENT PERNIAGAAN KOTA SAMARINDA

Yanuar Ismawati ¹, Daryono ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dengan Kelompok, Penerima, Pemanfaat, dan Pemelihara (KPP) Taman Odah Bekesah dalam pengelolaan Taman Odah Bekesah (Waterfront City) dengan pendekatan model collaborative governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh serta mengidentifikasi faktor penghambat yang terjadi selama proses kolaborasi berlangsung. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu, Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, Dampak dan Adaptasi Kolaborasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik dari Miles dan Huberman meliputi Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kolaborasi sudah dijalankan dengan adanya kesepakatan yang terjadi dalam menetapkan tujuan kolaborasi, tindakan kolaborasi berupa jadwal agenda kegiatan dalam pengelolaan Taman Odah Bekesah, serta dampak positif yang dihasilkan selama kolaborasi berjalan. Namun, posisi aktor kolaborasi yang tidak sejajar membuat kegiatan pengelolaan Taman Odah Bekesah tidak dapat dikategorikan sebagai collaborative governance. Perlu adanya perubahan metode pengelolaan yang tepat agar kegiatan ini ideal menjadi sebuah forum kolaborasi.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Waterfront City, Taman Odah Bekesah*

Pendahuluan

Kota Samarinda menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami permasalahan sosial yaitu terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Sehingga membutuhkan lebih banyak ruang untuk dijadikan tempat hunian bagi warga setempat. Salah satu yang menjadi sasaran dari dampaknya kepadatan penduduk ini adalah daerah aliran sungai (DAS) karena dianggap tempat yang efektif untuk masyarakat mendirikan bangunan tempat tinggal. Akibatnya, sering terlihat aktivitas masyarakat kota Samarinda yang dilakukan di kawasan pinggir

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yanuarismawati@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

sungai. Mereka memanfaatkan aliran sungai untuk melakukan kegiatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kegiatan mencuci, mandi dan aktivitas lainnya.

Perlu adanya penanganan terhadap permasalahan kawasan kumuh serta peningkatan kualitas permukiman yang baik agar terjaminnya kesejahteraan penduduk di Kota Samarinda terkhusus di daerah pinggiran sungai Karang Mumus. Pemerintah Kota Samarinda melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melakukan perencanaan pembangunan “Taman Odah Bekesah” di kawasan sempadan sungai Karang Mumus Segmen Perniagaan. Taman Odah Bekesah merupakan sebuah bangunan dengan konsep waterfront city yaitu pemanfaatan daerah sempadan sungai menjadi kawasan wisata tepi air sebagai fasilitas publik yang berguna untuk tempat hiburan masyarakat sekitar.

Taman Odah Bekesah telah dibangun dan berhasil diresmikan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada Selasa, 19 Januari 2021. Dalam pengelolaannya melibatkan pihak pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dengan pihak non pemerintah yaitu Kelompok Penerima, Pemanfaat, dan Pemelihara (KPP) Taman Odah Bekesah. Selama proses pengelolaan, terjadi kendala terkait koordinasi dan pemahaman tentang tugas dari masing-masing stakeholder sehingga terdapat pihak yang merasa memiliki beban tersendiri selama pelaksanaan pengelolaan karena seharusnya kolaborasi terdiri dari proses pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh suatu organisasi secara sendirian (O’Leary dan Bingham dalam Astuti et al., 2020:42).

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu menganalisa pemahaman tentang konsep *collaborative governance* diharapkan dapat memperbaiki pola kerjasama yang telah dilakukan selama proses pengelolaan taman. Dengan ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Pendekatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Taman Odah Bekesah (Waterfront City) di Kawasan Karang Mumus Segmen Perniagaan Kota Samarinda”**.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen Publik

Manajemen Publik menurut Overman dalam (Sudarmanto et al., 2020:70) merupakan manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Manajemen publik bukanlah "*scientific management*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific management*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukanlah juga administrasi publik, mempertimbangkan tekanan-tekanan antara orientasi "*rational-instrumental*" pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan di pihak lain.

Minogue dalam (Sudarmanto et al., 2020:72) telah merumuskan 5 hal yang

menjadi karakteristik utama dari manajemen publik, yaitu :

- a) Manajemen publik lebih banyak mengarah ke tugas fungsional pemerintahan daripada peran dalam perumusan kebijakan
- b) Manajemen publik lebih berkonsentrasi pada upaya mencapai tujuan daripada upaya dalam menjalankan proses dan prosedur
- c) Manajemen publik lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik daripada kebutuhan birokrasi
- d) Manajemen publik menghindarkan diri dari berperan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan peran utamanya memberikan arahan saja atau pemberdayaan kepada Masyarakat
- e) Manajemen publik mengubah diri dari budaya birokrasi.

Governance

Governance biasanya dikenal sebagai tata kelola atau proses pengelolaan kegiatan suatu pemerintahan yang dilaksanakan dan terdapat struktur kelembagaan di dalamnya. Menurut Dwiyanto dalam (Astuti et al., 2020:32) yang menjadi faktor utama dalam *governance* yaitu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dengan disertai berbagai tantangan dan masalah yang terjadi selama proses pengambilan keputusan sampai dengan pada saat penerapan hasil keputusan tersebut.

Kelembagaan dalam *governance* terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- 1) Negara/Pemerintahan : fungsi dari suatu pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan (menciptakan lingkungan politik dan kebijakan yang kondusif), tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*civil society organizations*).
- 2) Sektor Swasta : pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Selain itu juga dapat berperan dalam menciptakan pekerjaan dan pendapatan.
- 3) Masyarakat : kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi dan memfasilitasi interaksi sosial budaya dan politik, menggerakkan kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. (Anggara, 2012:205)

Collaborative Governance

Dalam mewujudkan adanya keputusan yang bersifat publik, maka perlu pengelolaan yang maksimal dan melibat tokoh yang berpengaruh dalam urusan publik. Ansell dan Gash dalam (Astuti et al., 2020:41) mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah publik dengan melibatkan lembaga diluar dari sektor

pemerintahan. Pemerintah merumuskan kebijakan dan beberapa program publik dalam forum pengambilan keputusan bersama dengan lembaga non pemerintah sekaligus masyarakat dengan menitikberatkan kesepakatan bersama.

Selain itu, Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh dalam (Astuti et al., 2020:81) membagi proses kolaborasi menjadi 3 hal yaitu :

- 1) Dinamika Kolaborasi : merupakan hal yang sangat penting karena di dalamnya bisa terlihat proses kolaborasi dilaksanakan, persamaan prinsip dan tujuan yang dimiliki para aktor, cara untuk saling memotivasi serta kapasitas yang dimiliki para aktor untuk melakukan kegiatan bersama-sama.
- 2) Tindakan Kolaborasi : segala aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh aktor merupakan gambaran dari dinamika kolaborasi yang terjadi. Sukses tidaknya pelaksanaan program serta pertemuan yang diselenggarakan dinilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh para aktor tentang dinamika kolaborasi tersebut. Akibat dari aktivitas tersebut memberikan pengaruh pada dinamika kolaborasi di masa mendatang.
- 3) Dampak dan Adaptasi Kolaborasi : dampak merupakan perubahan yang dihasilkan selama kolaborasi dijalankan baik dari segi positif maupun negatif. Dampak positif dapat berupa hasil kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun bersama, apabila hasilnya tidak sesuai maka dapat disebut sebagai dampak negatif. Dampak mengakibatkan terjadinya output yang dapat diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi dilakukan sebagai upaya kolaborasi dalam merespon masing-masing aktor. Apabila dalam kolaborasi tidak terjadi kecurangan dalam memanfaatkan sebuah kepentingan kelompok tertentu maka dapat dikatakan bahwa adaptasi berhasil dilaksanakan. Untuk kesuksesan kolaborasi di masa mendatang, adaptasi perlu memperhatikan hal-hal penting yang menjadi harapan utama dalam kolaborasi.

Konsep Waterfront City

Breen dalam (Prameswari, 2018:54) membagi konsep *waterfront city development* ke dalam 4 tipologi utama berdasarkan sifat dan jenis aktivitasnya, yakni: *mixed-used waterfront*, *recreational waterfront*, *residential waterfront*, *working waterfront*. Dalam *mixed-used waterfront*, kawasan tepian air digunakan sebagai lahan untuk kegiatan diluar dari karakter aktivitas area perkotaan seperti perniagaan, tempat kebudayaan, dan sebagainya; sedangkan dalam *recreational waterfront*, kawasan tepian air dimanfaatkan sebagai area rekreasi. Adapun *residential waterfront*, kawasan tepian air dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, sedangkan dalam *working waterfront*, kawasan tepian air digunakan sebagai aktivitas pekerjaan masyarakat di sekitar area *waterfront*.

Dalam pengembangannya, kawasan *waterfront city* perlu memperhatikan unsur-unsur yang mempengaruhinya, hal tersebut merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam upaya mendekati konsep penataan kawasan tepi air yang baik. Menurut Ann Breen dan Dicky Rigby dalam (Latif et al., 2020:2), unsur unsur tersebut antara lain ekonomi, sosial, dan preservasi. Kemudian Rahman

dalam (Zikri, 2022:30) menambahkan bahwa unsur-unsur diatas masih perlu didukung beberapa unsur lain yang mendukung keberhasilan pengembangan kawasan *waterfront city*. Unsur-unsur keberhasilan pengembangan *waterfront city* tersebut antara lain tema, *image* (citra), pengalaman, fungsi, membentuk opini masyarakat, lingkungan, aspek teknologi, pembiayaan, dan pengelolaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian mengacu pada model collaborative governance menurut Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh yaitu, 1) Dinamika Kolaborasi, 2) Tindakan Kolaborasi, 3) Dampak dan Adaptasi Kolaborasi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data didapat dari narasumber yaitu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Kota Samarinda, Ketua Kelompok Penerima Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Taman Odah Bekesah Segmen Perniagaan Kelurahan Dadi Mulya, Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Kota Samarinda. Analisis data dilakukan menggunakan tahapan dari Miles dan Huberman yaitu, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendekatan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Taman Odah Bekesah (Waterfront City) Di Kawasan Karang Mumus Segmen Perniagaan Kota Samarinda

a. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi dijalankan dengan beberapa sub indikator di dalamnya. Pada sub indikator pertama yaitu prosedur dan kesepakatan institusi, menunjukkan bahwa pengaturan prosedur sudah terbentuk dengan adanya SK Walikota walaupun belum sempurna dikarenakan dalam SK tersebut tidak memuat secara rinci peraturan-peraturan yang mengatur selama kolaborasi berjalan. Selanjutnya, pada sub indikator kedua yaitu kepemimpinan 92 sudah diterapkan dalam kolaborasi ini dengan ditunjuknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai penanggung jawab utama pengelolaan Taman Odah Bekesah Segmen Perniagaan Kota Samarinda hal tersebut sekaligus menunjukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memegang peran kepemimpinan dalam kolaborasi ini walaupun secara realitanya belum berjalan dengan baik. Kemudian, pada sub indikator ketiga yaitu pengetahuan yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan menyampaikan informasi berupa himbauan atau hasil pencapaian kerja yang disampaikan kepada Kelompok Penerima Pemanfaat dan Pemelihara kemudian pengetahuan diteruskan oleh masyarakat. Lalu sub indikator keempat yaitu, sumber daya yang ditunjukkan dengan adanya pengadaan dana operasional pengelolaan taman yang

diambil dari APBD Kota Samarinda serta sumbangan dari Ketua KPP. Terkait Pembagian peran dan waktu juga telah dilakukan dengan merujuk pada SK Walikota Samarinda Nomor 655/146/HK-KS/III/2022 walaupun belum sempurna karena tidak dijelaskan secara rinci perihal pembagian waktu kolaborasi. Kemudian juga dilakukan pembinaan berupa edukasi terkait kebersihan serta untuk ketertiban taman yang dilakukan pada awal terlaksananya kolaborasi sebagai bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Kelompok Penerima Pemanfaat dan Pemelihara Taman Odah Bekerah Segmen Perniagaan.

b. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi dalam pengelolaan Taman Odah Bekerah di Kawasan Karang Mumus Segmen Perniagaan Kota Samarinda menunjukkan tindakan nyata yang dilakukan oleh para aktor dalam mencapai tujuan bersama, seperti perawatan fasilitas taman, kegiatan sosialisasi serta edukasi untuk menjaga kebersihan taman, dan kegiatan penertiban taman. Kegiatan tersebut dilakukan disesuaikan peran masing-masing yang dimiliki para actor. Hal ini sejalan dengan teori Balogh, dkk (2012) bahwa Tindakan kolaborasi pada praktiknya sangat bermacam-macam apapun bentuk yang dilakukan baik dalam wujud kegiatan, sosialisasi, maupun pelatihan yang dilakukan oleh pihak kolaborasi.

c. Dampak dan Adaptasi Kolaborasi

Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Odah Bekerah menghasilkan dampak positif berupa meningkatnya kepedulian masyarakat, pengurangan kawasan kumuh, dan optimalisasi ruang publik, namun juga menghadapi dampak negatif seperti gangguan ketertiban dan kendala anggaran. Hambatan tersebut diatasi melalui evaluasi, pengetatan aturan, pemberian sanksi, serta upaya peningkatan pendanaan melalui kelompok usaha dan penerapan tarif di fasilitas taman. Hal ini sejalan dengan teori Balogh, dkk (2012) bahwa proses kolaborasi akan memberikan dampak yang kemudian menghasilkan umpan yang nantinya akan diadaptasi oleh kolaborasi.

Faktor Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Taman Odah Bekerah (Waterfront City) Di Kawasan Karang Mumus Segmen Perniagaan Kota Samarinda

Kolaborasi dalam pengelolaan Taman Odah Bekerah (Waterfront City) menghadapi tiga faktor hambatan. Pertama, pada faktor budaya yang menghambat proses kolaborasi ini adalah konsep *top-down* yang dilakukan pemerintah dalam membuat perencanaan kegiatan pengelolaan taman dimana pihak non pemerintah masih kurang keterlibatannya. Kedua, Faktor institusi juga menjadi salah satu penghambat dalam kolaborasi ini dimana dalam pengelolaan taman masih terpaku pada kepentingan instansi pemerintah. Sedangkan dalam kolaborasi apapun yang terjadi harus melihat dari kepentingan seluruh aktor yang terlibat. Ketiga, dalam faktor politik, proses kolaborasi dirasa belum terlalu inovatif dalam mengelola dan mengembangkan taman. Kegiatan yang

dilaksanakan terlalu berpacu pada konsep kegiatan pada umumnya. Karena dalam proses kolaborasi perlu adanya agenda kegiatan yang inovatif untuk menciptakan tujuan politik yang positif.

Penutup

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan Taman Odah Bekesah (Waterfront City) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dengan Kelompok Penerima, Pemanfaat, dan Pemelihara (KPP) Taman Odah Bekesah belum memenuhi kriteria apabila dijelaskan menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Kegiatan pengelolaan taman yang telah dilakukan tidak terlihat sebagai sebuah bentuk forum kolaborasi. Dilihat juga dari posisi para aktor yang terlibat bahwa keduanya tidak sejajar apabila disatukan dalam kegiatan kolaborasi. Alasannya adalah, salah satu aktor yang terlibat masih bergantung pada aktor lain dan posisi mereka dalam berkegiatan seperti atasan dan bawahan.

Saran

Berdasarkan penelitian terkait collaborative governance dalam pengelolaan Taman Odah Bekesah di Kawasan Karang Mumus Segmen Perniagaan Kota Samarinda, beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Lebih sering melibatkan kehadiran aktor baik dari dinas maupun kelompok masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan taman dengan menyelenggarakan agenda pertemuan secara rutin seperti rapat bulanan atau rapat tahunan. Pertemuan rutin juga dapat dijadikan sebagai forum evaluasi agar progres pengelolaan taman terpantau dengan baik.
2. Meningkatkan inovasi dalam pengelolaan Taman Odah Bekesah. Inovasi yang dapat dijadikan acuan adalah menambah fasilitas yang mendukung konsep *waterfront city* yaitu fasilitas yang berkaitan dengan wisata tepi air seperti wisata perahu, memanfaatkan sebagian ruang yang ada menjadi galeri edukasi lingkungan, menyelenggarakan event atau bazar tahunan untuk menghidupkan suasana taman.
3. Dalam kegiatan pengelolaan Taman Odah Bekesah, kedepannya dapat melibatkan lebih banyak aktor yang terkait seperti organisasi peduli lingkungan, akademisi, media, tokoh masyarakat, kelurahan maupun kecamatan. Dengan bantuan aktor dari berbagai sektor, kegiatan pengelolaan akan semakin berkembang sesuai peran dan keahlian dari masing-masing aktor tersebut. Maka dengan begitu, kegiatan pengelolaan taman ini nantinya bisa menerapkan pendekatan *collaborative governance*.

Daftar Pustaka

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak.

- Astuti, R. S., Wasono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Universitas Diponegoro Press.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2016). Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Latif, J. M., Arif, I., & Mulyawati, L. S. (2020). Pengembangan Ruang Kawasan Tepi Pantai Untuk Rekreasi dalam Mendukung Kota Ternate sebagai 116 Waterfront City. 1(1), 1-11. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikpwk/article/view/1384>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendekia.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2019). Land Aquicition Resettlement Action Plan (LARAP) Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 - Segmen Perniagaan.
- Prameswari, Y. P. (2018). Waterfront City Development di Kawasan Sempadan Sungai: Studi Kasus Sungai Wiso dan Kanal, Jepara. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 51-72. DOI : 10.14710/jiip.v3i1.3233
- Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M. Y., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., Silalahi, M., & Dewi, I. K. (2020). Manajemen Sektor Publik. Yayasan Kita Menulis.
- Suprpto, H. (2020). Penerapan Metodologi Penelitian Dalam Karya Ilmiah. Gosyen Publishing.
- Zikri, M. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir Berdasarkan Konsep Waterfront City (Studi Kasus Kota Tanjung Pinang). Universitas Islam Riau.